

OMBUDSMAN RI: PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA KEBIJAKAN DI SEKTOR PERTANIAN PERLU PERHATIAN MENDALAM

Rabu, 27 Oktober 2021 - Imanda Kartika Sari

Siaran Pers

Nomor 046/HM.01/X/2021

Rabu, 27 Oktober 2021

BANJARMASIN - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai pelayanan publik dan tata kelola kebijakan di sektor pertanian perlu perhatian mendalam dari Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Tematik "Membangun Kualitas Pelayanan Publik Pertanian" di aula kantor Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (27/10/2021).

"Yang kami hadapi bahwa masih banyak kebijakan di sektor pertanian yg perlu pengawalan dari Ombudsman demi membaiknya pelayanan publik," ucapnya.

Adanya wacana impor beras pada awal tahun 2021 menjadi perhatian besar Ombudsman dikarenakan bertepatan dengan hari panen raya sehingga berpotensi merugikan para petani. Selain itu, Ombudsman juga menemukan maladministrasi dalam tata kelola beras pemerintah. Kebijakan dalam penetapan impor selama ini belum mempertimbangan semua aspek indikator seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam hal penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kebijakan yang tidak komprehensif mengakibatkan beras turun mutu yang berpotensi merugikan negara.

"Tidak kurang dari 200 ribu ton beras turun mutu yang nilainya setara dengan 2 triliun dan ini ditanggung negara, dan ini akibat dari tata kelola yang tidak baik," ungkap Yeka.

Yeka juga menjelaskan bahwa ada indikator-indikator yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

"Kami breakdown ada 12 indikator yang perlu dipertimbangkan pemerintah ketika mengambil kebijakan keputusan importasi beras. Dan ke depan ke 12 indikator ini perlu diterapkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian," pungkasnya.

Menambahkan, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menjelaskan bahwa beberapa permasalahan kerap dikeluhkan oleh para petani seperti minimnya perhatian bagi para petani baik sisi anggaran dan pelatihan, harga pupuk yang tidak bersahabat, dugaan diskriminasi bantuan tani, lambatnya respons atas keluhan petani hingga belum lengkapnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) Pertanian.

Berdasarkan hasil monitoring Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan sejak tahun 2013 hingga 2021 menemukan bahwa dinas pertanian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih minim dalam hal menyediakan standar pelayanan publik di sektor pertanian. Ombudsman Perwakilan Kalsel tidak jarang mendapatkan laporan bahwa keluhan para petani kerap kali diabaikan oleh penyedia pengelola pengaduan pertanian.

"Kami sudah meminta klarifikasi langsung baik ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, kelompok tani, para petani dan akademisi untuk menggali informasi. Serta melakukan telaah atas dokumen dan peraturan perundangan dan melakukan spot cek lapangan ke area pertanian," ucap Hadi.

Hasilnya Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan Hadi Rahman mendapati bahwa harga gabah selalu anjlok pada

panen raya dikarenakan sebaran gabah yang dilakukan oleh Bulog rendah sementara petani harus menjual gabah untuk membayar hutang pupuk, pestisida dan lainnya ketika sudah selesai panen. Sehingga para petani terpaksa menjual gabah dengan harga rendah yang ditawarkan tengkulak.

Selain itu di tahun ini, Ombudsman juga memberikan perhatian khusus terkait tata kelola Pupuk Bersubsidi. Tidak kurang sekitar 25-34 triliun pemerintah pusat mengelontorkan dana subsidi yang terindikasi pemanfaatannya belum berdampak terhadap peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani.

Terkait dengan pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah juga dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan para petani. Padahal para petani sudah menyampaikan kebutuhan pupuknya melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), namun faktanya kurang 50% kebutuhan pupuk petani yang diberikan pemerintah.

Penyampaian RDKK secara online juga dirasa belum efektif karena para petani masih kesulitan dalam memasukan data kebutuhan pupuk petani ke sistem RDKK karena terkendala jaringan. Hal tersebut menyebabkan data menjadi tidak lengkap dan tidak terinput secara baik, akibatnya kebutuhan pupuk petani tidak terdata dan teranggarkan.

Permasalahan pupuk juga terjadi dalam proses distribusi. Stok pupuk kosong ketika bulan Desember, Januari dan Februari sementara pada waktu tersebut bertepatan dengan masa tanam padi.

Hasil pengamatan tim Ombudsman di sejumlah kantor Dinas Pertanian Kalimantan Selatan masih sangat terbatas dalam hal pemenuhan SPP. Belum tersedianya fasilitas pengaduan yang efektif di sejumlah Dinas Pertanian di Kalimantan Selatan baik dari sisi SOP Pengelola Pengaduan, penunjukan petugas pengelola pengaduan yang kompeten serta tidak tersedianya fasilitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) bagi publik khususnya para petani yang mengakses layanan di Dinas Pertanian.

"Dapat disimpulkan sektor pertanian menjadi sektor vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga kita menaruh perhatian pada sektor ini karena penting dalam ketahanan bangsa," pungkas Hadi Rahman.

Yeka Hendra Fatika juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI berkomitmen untuk berperan aktif memastikan agar produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan. Serta regulasi yang dihadirkan tidak merugikan para kelompok tani. Terkait hal ini, Yeka menyampaikan perlu keterlibatan penuh Ombudsman dalam mengawal perencanaan pembangunan secara bottom up bekerjasama dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Perencana Madya Bappenas Andi Setyo Pambudi mendukung penuh keterlibatan Ombudsman dalam mengawal perencanaan pembangunan dari daerah hingga pusat dan hal tersebut merupakan kegiatan pencegahan maladministrasi.

Selain itu, perlu dibangun keterlibatan perguruan tinggi dalam mengusulkan berbagai macam kebijakan melalui berbagai kegiatan penelitian dan diharapkan Ombudsman bisa berperan dalam mengadvokasi usulan perguruan tinggi itu, sehingga regulasi terkait pencegahan maladministrasi menjadi lebih berkualitas dan membumi.

Terkait hal ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, merespons positif usulan Bappenas ini. Gagasan penelitian terkait regulasi dalam mencegah maladministrasi akan membuat motivasi para peneliti semakin meningkat, sehingga peran perguruan tinggi dalam memperbaiki pelayanan publik semakin nyata.

Anggota Ombudsman RI

Yeka Hendra Fatika

(081945130676)